

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaian dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan (UU No: 2 Tahun 1989, pasal 37).

Dalam kerangka pendidikan nasional dan pembangunan bangsa, pembinaan generasi muda merupakan bagian yang terpadu dan yang tidak dapat dipisahkan.

Ditinjau dari segi pembangunan, generasi muda khususnya para siswa merupakan potensi bangsa yang perlu dibina agar dapat bersama-sama mengisi era pembangunan kita dengan sumbangan yang nyata.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat menuntut relevansi kegiatan siswa khususnya SMKK agar tidak ketinggalan sehingga keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat khususnya dunia industri.

SMKK bertujuan menghasilkan lulusan yang mempunyai keterampilan kerumahtanggaan dalam bidang masak-memasak, jahit-menjahit, merawat kecantikan serta pelayanan pariwisata.

Salah satu wadah bagi SMKK yang dapat digunakan dalam rangka memotivasi siswa untuk berpartisipasi dalam pembangunan adalah melalui pembinaan kewiraswastaan, yaitu pembinaan melalui Unit Produksi Sanggar.

Unit Produksi Sanggar sebagai wadah disekolah yang bertujuan mempertinggi kemampuan siswa terjun kelapangan kerja. Disamping itu, unit tersebut merupakan tempat siswa berlatih mempertebal kepercayaan diri sendiri, memperkokoh rasa tanggung jawab dan disiplin maupun dalam membina kerjasama yang diperlukan dalam setiap pekerjaan, baik sebagai karyawan maupun sebagai wiraswastawan.

Disamping itu, Unit Produksi Sanggar melatih siswa untuk menumbuhkan jiwa berwiraswasta dengan organisasi dan administrasi yang tertib.

Bertitik tolak dari isu dewasa ini bahwa dianjurkan bagi setiap individu untuk mampu berusaha sendiri mengingat terbatasnya lapangan kerja yang tersedia, baik selaku individu, keluarga atau bangsa maka diperlukan pengetahuan tentang kewiraswastaan agar supaya kelak mampu untuk berwiraswasta.

Kewiraswastaan ini dianggap penting mengingat belum seimbangannya antara banyaknya angkatan kerja yang ada dengan tersedianya lapangan kerja, baik lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah, swasta asing maupun swasta nasional. Di negara kita ini masih kita dapati pengangguran, baik pengangguran yang nyata maupun pengangguran yang tidak kentara. Pengangguran ini merupakan permasalahan yang sulit diatasinya oleh pemerintah kita hingga kini

Terlebih-lebih bila kita menyimak bahwa perkembangan penduduk Indonesia berkembang dengan pesatnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1

## TREND PERKEMBANGAN PENDUDUK DI INDONESIA

Tahun	Jumlah	Perkembangan	Prosentase Kenaikan
1961	97.018.829	-	-
1971	118.174.081	21.155.252	21,85
1980	147.331.823	29.157.742	24,67
1990	179.194.223	31.862.400	21,63
1995	194.754.808	15.560.585	8,68

Sumber : Penduduk Indonesia  
 Hasil Survei Penduduk antar Sensus 1995  
 Biro Pusat Statistik (BPS) Jakarta Indonesia

Perkembangan penduduk yang besar jumlahnya ini tentunya akan membawa dampak makin bertambah banyak jumlah angkatan kerja sedangkan lapangan kerja yang ada belum bisa menampungnya, maka akan kita jumpai pengangguran yang nyata di masyarakat.

Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2

## JUMLAH PENCARI PEKERJAAN

Keterangan	Jumlah
Jumlah angkatan kerja	86.361.261
Jumlah yang bekerja	80.110.060
Jumlah pencari pekerjaan	6.251.201

Sumber : Penduduk Indonesia  
 Hasil Survei Penduduk antar Sensus 1995  
 Biro Pusat Statistik (BPS) Jakarta Indonesia

Masih adanya pengangguran dalam jumlah yang besar itu karena langkanya kemampuan berwiraswasta di kalangan angkatan kerja bangsa

Indonesia. Faktor-faktor yang menyebabkan langkanya bangsa Indonesia berwiraswasta yakni masih kurangnya tenaga trampil (skilled labour) di kalangan bangsa Indonesia, kemudian tiadanya modal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia lebih-lebih masih besarnya mental priayi yang melekat pada jiwa bangsa Indonesia, serta masih banyaknya bangsa Indonesia yang belum mengerti apa itu kewiraswastaan. Kehadiran kewiraswastaan di tengah-tengah kita dengan tujuan untuk mengadakan perubahan tingkah laku dan perbuatan dari setiap individu dari tingkah laku dan perbuatan yang menghambat menjadi tingkah laku dan perbuatan yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan peningkatan kemakmuran masyarakat serta menumbuhkan kemampuan berusaha sendiri dikalangan masyarakat. Jadi untuk memberi pertolongan kepada orang miskin dan pengangguran, bukanlah memberikan makanan yang habis dimakan dalam satu hari, akan tetapi dengan memberi bekal kewiraswastaan agar mereka dapat meolong dirinya sendiri keluar dari kesulitannya.

Pada negara-negara sedang berkembang, kehausan akan kekuasaan (need of power) adalah yang paling menonjol dan kemudian menyusul kehausan untuk berafiliasi (need of affiliation), sedang kehausan untuk berprestasi dalam pembangunan masih sangat sedikit. Padahal, usaha untuk menggerakkan penduduk agar berprestasi dalam pembangunan masih sangat sedikit, maka perlu digerakkan segala unsur yang dapat mendukung need of achievement yang menjadi pokok pembahasan dalam pendidikan kewiraswastaan. Melalui pendidikan kewiraswastaan akan dihasilkan manusia-manusia yang berjiwa wiraswasta. Apalagi kalau kita secara jujur mau melihat kebelakang melalui sejarah, maka kultur kewiraswastaan relatif baru dikenal pada abad setelah kemerdekaan saja bagi bangsa Indonesia, terutama yang bergerak dalam lapangan produksi masa. Pendidikan

kewiraswastaan berperan dalam memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dan berkreasi dalam pembangunan. Dengan kata lain, bahwa untuk menjadikan jumlah penduduk yang besar menjadi modal pembangunan adalah melalui pendidikan kewiraswastaan. Karena pengertian wiraswasta, menunjukkan adanya kemampuan untuk terus menerus mengikuti dan menyesuaikan diri pada ilmu dan teknologi yang terus berkembang. Setiap bangsa terutama yang sedang berkembang seyogyanya mengusahakan untuk meningkatkan sikap mental wiraswasta, bilamana ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui pembangunan. Tenaga-tenaga wiraswasta yang bermunculan itulah diharapkan sebagai enterpreneur Pancasila yang merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia.

Apabila kita menengok negara kita sendiri yang secara potensial kaya raya alamnya namun masih tergolong kepada negara yang sedang berkembang karena kekayaan alam yang masih tersembunyi itu masih harus diefektifkan atau digali untuk dimanfaatkan bagi rakyat dan bangsanya. Untuk menggali alam yang kaya raya inilah diperlukan tenaga-tenaga yang dapat mengkoordinir seluruh faktor produksi untuk menghasilkan sesuatu produk yang selanjutnya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsanya yaitu yang disebut wiraswasta. Oleh karena itu masih terbuka lebar bagi para generasi muda untuk menekuni dunia wiraswasta.

Pembangunan ekonomi berarti pengolahan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi serta melalui penambahan kemampuan berorganisasi dan pimpinan. Mengingat jumlahnya yang tidak memadai, ditambah dengan kekurangan mobilitas dari faktor-faktor tersebut, disertai dengan kekakuan

dalam pembuatan harga, tidak terpenuhinya skala perusahaan yang ekonomis, kurang terpenuhinya persyaratan pasaran, masih dangkalnya pengkhususan dalam produksi, dan sebagainya menyebabkan bahwa proses transformasi kekuatan ekonomi potensial menjadi riil berada di bawah optimum, suatu gejala yang umum dalam pembangunan di negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia.

Dengan demikian produksi nasional tidak berada pada kurve kemampuan produksi yang optimal atau kurve transformasi optimal, tetapi masih berada jauh dibawahnya, yang berarti bahwa kombinasi faktor-faktor produksi tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya dan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia masih belum dilakukan secara efisien dengan akibat bahwa produksi nasional belum berada pada titik yang optimum.

Kesemuanya ini disebabkan masih kurangnya wiraswasta yang ilmiah, terutama sekali untuk golongan pribumi masih sebagian besar merupakan wiraswasta yang tradisional yang cara berfikirnya masih belum rasional. Berkenaan masih dirasakan akan kurangnya wiraswasta di Indonesia terlebih-lebih kebanyakan wiraswasta pribumi adalah wiraswasta alamiah, maka pendidikan kewiraswastaan mempunyai arti yang sangat penting karena disamping menambah jumlah wiraswasta yang sudah ada juga mengupgrade wiraswasta-wiraswasta yang alamiah.

Dengan diberikannya pendidikan kewiraswastaan, siswa akan mengetahui bagaimana cara memulai berusaha, dimulai dari berusaha yang sederhana sampai berusaha yang modern, misalnya tentang menggunakan metode-metode manajemen yang baru dan pengetahuan tentang sumber-sumber permodalan serta mengetahui bentuk-bentuk Badan Hukum sehingga

diharapkan dapat memperluas usahanya dan berarti dapat mengurangi pengangguran yang terjadi di masyarakat sekitarnya. Dengan demikian outputnya (keluarannya) dapat bekerja secara mandiri. Mereka bekerja atas dasar daya cipta dan karyanya sendiri. Mereka tidak bergantung atau menunggu kesempatan untuk bekerja yang ditawarkan atau disediakan oleh pemerintah, maupun oleh pihak swasta. Tetapi mereka mempunyai inisiatif dan kreatif sendiri, yang dapat mengembangkan kemampuan berwiraswasta.

Inilah tujuan pendidikan kewiraswastaan yang terkandung pada Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas, dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran ini sebagai akibat jumlah penduduk yang berkembang secara cepat, tidak seimbang dengan lapangan kerja yang tersedia dengan banyaknya pencari kerja, ditambah lagi adanya arus urbanisasi yang sulit dibendung, maka pemerintah merasa perlu mendidik warga negaranya yang mampu berbuat untuk menciptakan lapangan kerja sendiri.

Maksud pemerintah ini telah dituangkan dalam SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 0289b/U/1985 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas, Bab I pasal I butir 1 menyebutkan bahwa:

Pendidikan wiraswasta adalah upaya pendidikan untuk menanamkan pengertian, kesadaran, sikap prilaku secara mandiri kepada peserta didik dalam rangka meningkatkan tarap hidup dan kesejahteraan baik untuk diri sendiri maupun masyarakat (SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 0289b/U/1985).

Karena hal-hal tersebut diatas maka penulis membuat analisa tentang implementasi kurikulum SMKK 1984 dalam mengembangkan kemampuan berwiraswasta bagi para alumninya. (Suatu studi pada alumni SMKK Negeri Bogor).

Untuk mendapatkan gambaran tentang alumni SMKK negeri Bogor, maka dapat penulis sajikan data sebagai berikut:

Tabel 3

## KEADAAN ALUMNI SMKK NEGERI BOGOR

Angkatan	Jumlah Kelulusan	Mandiri	Dipekerja -kan	Melanjut-kan	Belum Bekerja	Tidak Terjaring
1987-1988	161	9	55	20	18	59
1988-1989	184	21	127	20	7	9
1989-1990	185	18	105	27	21	13
1990-1991	226	17	80	55	38	36
1991-1992	223	25	67	66	31	45

Sumber: Catatan Data Alumni SMKK Negeri Bogor

### B. Perumusan Masalah

Menurut S. Nasution dalam bukunya Kurikulum dan Pengajaran, kurikulum dipandang sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar-mengajar dibawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya (S. Nasution, 1989: 5).

Kemudian pedoman kurikulum disusun untuk menentukan dalam garis besarnya :

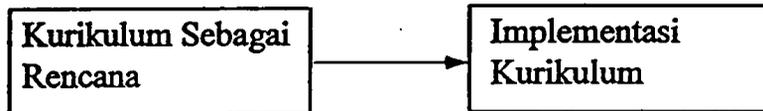
- Apa yang akan diajarkan (ruang lingkup, scope).
- Kepada siapa diajarkan.
- Apa sebab diajarkan dengan tujuannya.
- Dalam urutan yang bagaimana (sequence).

(S. Nasution, 1989 : 8)

Bertitik tolak dari pengertian kurikulum dan latar belakang masalah yang telah dikemukakan terlebih dahulu, hal ini menimbulkan permasalahan pokok yaitu bagaimana pengembangan kemampuan berwiraswasta dalam implementasi kurikulum SMKK 1984 bagi para alumninya.

Studi tentang kurikulum pada dasarnya dapat dilihat dalam dua bidang besar, yaitu, studi tentang pengembangan kurikulum sebagai suatu rencana (Curriculum Plan) dan studi tentang implementasi kurikulum. Secara fisik, kurikulum dapat berbentuk buku atau dokumen tertulis berisi sejumlah ide/konsep dan nilai-nilai yang dikembangkan oleh ahli-ahli kurikulum. Kurikulum tertulis tersebut mempunyai arti apabila diimplementasikan dalam kegiatan nyata. Kedua bidang tersebut dapat digambarkan seperti :

Gambar 1 : Studi Tentang Pengembangan Kurikulum sebagai Suatu Rencana dan Studi Tentang Implementasi Kurikulum .



Sumber : Implementasi Kurikulum, S. Hamid Hasan, FPIPS IKIP Bandung (1984:2)

Implementasi kurikulum oleh beberapa ahli seperti Fulan, Beauchamp, Frost dan Rowland diartikan sebagai upaya merealisasikan ide, konsep dan nilai-nilai yang terkandung dalam kurikulum tertulis menjadi kenyataan (S. Hamid Hasan, 1984:2). Wujud nyata dari implementasi kurikulum adalah aktivitas belajar-mengajar di kelas sebagai operasionalisasi dari kurikulum tertulis. Kelangsungan aktifitas belajar-mengajar di kelas pada prinsipnya ada ditangan guru, karena guru adalah sebagai implementor dari suatu kurikulum. Pernyataan diatas menunjukkan bahwa implementasi kurikulum tidak akan

pernah ada bila guru sama sekali tidak melaksanakan ide, konsep, dan nilai-nilai yang ada dalam aktivitas belajar mengajar dikelas. Aktivitas belajar mengajar di kelas sebagai wujud implementasi kurikulum meliputi: Penyusunan pengajaran, pelaksanaan pengajaran, penilaian, perbaikan dan penyempurnaan pengajaran.

Akhirnya keberhasilan pelaksanaan suatu kurikulum sangat dipengaruhi oleh kondisi dan aktivitas siswa, guru, serta para pelaksana kurikulum lainnya; oleh kondisi lingkungan fisik, sosial budaya dan psikologis sekitar, oleh kondisi dan kelengkapan sarana dan prasarana baik di sekolah maupun dalam keluarga. Pendidikan dan pengajaran selalu berlangsung dalam keterbatasan-keterbatasan, baik keterbatasan kemampuan, fasilitas, waktu, tempat maupun biaya. Yang harus selalu diupayakan oleh para penyusun, pengembang dan pelaksana pendidikan umumnya, kurikulum khususnya adalah optimalisasi (Nana Syaodih Sukmadinata:1988,141)

### **C. Pembatasan Masalah**

Yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kurikulum SMKK tahun 1984 dalam mengembangkan kemampuan berwiraswasta di SMKK Negeri Bogor.

Sebenarnya mata pelajaran kewiraswastaan dapat diberikan dari tingkat SD sampai dengan tingkat perguruan tinggi yang mana jangkauannya sangat luas. Menyadari akan keterbatasan penulis, yang hanya menguasai materi kewiraswastaan pada tingkat SLTA dan perguruan tinggi serta datanya yang memungkinkan untuk diadakan penelitian secara akurat maka penulis

akan membatasi masalah pada implementasi kurikulum SMKK Negeri Bogor 1984 dalam mengembangkan kemampuan berwiraswasta.

Dengan demikian akan diketahui dampaknya implementasi pada mata pelajaran kewiraswastaan dihubungkan dengan tumbuhnya kemampuan berwiraswasta dikalangan para alumni SMKK Negeri Bogor.

Adapun sampelnya diambil dari para alumni SMKK Negeri Bogor dari angkatan 1988/1989 sampai dengan 1992/1993, dengan demikian data yang disajikan merupakan data yang akurat untuk membuat suatu analisis tentang kurikulum SMKK Negeri Bogor 1984 dan implikasinya terhadap pelaksanaan pelajaran kewiraswastaan serta dampaknya terhadap kemampuan berwiraswasta bagi para alumninya.

#### **D. Definisi Operasional**

Ada beberapa istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, mungkin saja akan terjadi adanya penafsiran yang berbeda antara penulis dan pembaca. Untuk itu penulis mendefinisikan istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Implementasi kurikulum dalam penelitian ini diartikan sebagai proses memindahkan nilai dari isi yang terkandung dalam kurikulum yang potensial oleh guru kepada peserta didik dengan melalui aktivitas pengajaran atau proses belajar-mengajar.
2. Pengembangan kemampuan berwiraswasta yaitu: menumbuhkan dan memperluas serta memperkuat potensi atau kekuatan dan kesanggupan sebagai manusia berjiwa luhur yang mampu untuk berdiri sendiri, yakni sebagai usahawan yang berhasil mendapatkan perbaikan pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsanya.

## E. Pertanyaan Penelitian

Pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini ialah: bagaimana implementasi kurikulum SMKK tahun 1984 dalam mengembangkan kemampuan berwiraswasta di SMKK Negeri Bogor?

Pokok permasalahan ini dapat dirinci menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

A. Bagaimana implementasi kurikulum kewiraswastaan di SMKK Negeri Bogor.

### 1. Tentang Strategi Pengajaran

- a. Bagaimana mata pelajaran kewiraswastaan dan mata pelajaran yang lain dapat menumbuhkan kemampuan berwiraswasta?
- b. Bagaimana mata pelajaran kewiraswastaan dan mata pelajaran yang lain dapat menumbuhkan sikap dan motif berwiraswasta?
- c. Bagaimana pelajaran kewiraswastaan dan mata pelajaran yang lain dapat menumbuhkan keterampilan berwiraswasta?
- d. Apakah PBM dan Media Pendidikan yang digunakan dapat menunjang tumbuhnya kemampuan berwiraswasta?

### 2. Tentang Peran Guru dalam Proses Belajar Mengajar

- a. Bagaimana guru mata pelajaran teori menarik para siswa agar menyenangi berwiraswasta?
- b. Bagaimana caranya guru mata pelajaran non kewiraswastaan, guru Praktek dan pembimbing dalam perusahaan berusaha menumbuhkan keterampilan berwiraswasta?
- c. Bagaimana Peran Kepala Sekolah dalam membantu menumbuhkan kemampuan berwiraswasta?

- d. Apakah guru mata pelajaran kewiraswastaan dan guru mata pelajaran yang lain dalam mengajar telah dapat menumbuhkan kemampuan berwiraswasta bagi para siswanya?
- e. Apakah guru mata pelajaran kewiraswastaan telah menguasai sepenuhnya seluk-beluk tentang berwiraswasta sehingga memberikan lebih jelas bagi siswanya untuk berwiraswasta?

### 3. Tentang Keadaan Siswa dan Alumni

Apakah para siswa SMKK Negeri Bogor tertarik dan menyenangi mata pelajaran kewiraswastaan?

### B. Tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum kewiraswastaan di SMKK Negeri Bogor.

- a. Apakah kondisi fasilitas pendidikan yang disediakan oleh SMKK Negeri Bogor telah cukup memadai dalam menumbuhkan kemampuan berwiraswasta bagi para siswanya?
- b. Apakah pandangan keluarga terhadap alumni dapat memberikan dorongan positif untuk berwiraswasta?
- c. Apakah peran kondisi sosial ekonomi lingkungan masyarakat alumni turut membantu tumbuhnya kemampuan berwiraswasta?
- d. Apakah alumni mendapatkan pembinaan dari instansi terkait untuk menumbuhkan kemampuan berwiraswasta?

### F. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menemukan dampak implementasi kurikulum SMKK 1984 dalam menumbuhkan kemampuan

berwiraswasta ditinjau dari teori maupun dari lapangan terhadap para alumninya.

Secara khusus penelitian ini bertujuan:

1. Mengetahui sejauhmana implementasi kurikulum SMKK 1984 memberikan motivasi dan semangat untuk menumbuhkan berwiraswasta bagi para alumninya.
2. Mengetahui Sejauhmana kurikulum SMKK 1984 dalam memberikan keterampilan profesi untuk bekal menumbuhkan kemampuan berwiraswasta bagi para alumninya.
3. Mengetahui penggunaan media pendidikan yang paling tepat dalam pelaksanaan PBM mata pelajaran kewiraswastaan di SMKK Negeri Bogor.
4. Untuk mengetahui sampai sejauh mana kurikulum SMKK 1984 dalam memberikan dampak dalam menanamkan sikap dan minat untuk tumbuhnya kemampuan berwiraswasta bagi para alumninya.
5. Merekomendasikan metode belajar apa yang paling tepat dipergunakan untuk mengaplikasikan kurikulum mata pelajaran kewiraswastaan SMKK 1984.

## **G. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan kajian dalam upaya mendalami kurikulum sebagai sesuatu sistem, terutama dalam implementasi kurikulum.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi perbaikan dan penyempurnaan konten kurikulum SMKK 1984, yang meliputi instansi-instansi sebagai berikut:

- a. Bagi guru SMKK Negeri Bogor yang memberi pelajaran tentang kewiraswastaan dimana hasil penelitian ini dapat dipergunakan untuk memberikan motivasi yang tinggi dalam kemampuan berwiraswasta bagi para siswanya.
- b. Bagi Kepala Sekolah SMKK Negeri Bogor hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan pengelolaan lembaga ini terutama pada pengelolaan pengajaran kewiraswastaan.
- c. Bagi Direktur Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam menyusun kurikulum SMKK di seluruh Indonesia.
- d. Bagi program studi Pengembangan Kurikulum, dapat membuka wawasan bagi penelitian-penelitian lebih lanjut, khususnya dalam masalah pengembangan kurikulum kewiraswastaan di sekolah kejuruan menengah atas.

